

Dampak Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022

Harsya Saputra^{✉1}, Debi Abdiska², Muhammad Ilham³, dan Neng Kamarni⁴
Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas
Correspondence Author: harsyabona@gmail.com[✉]

Article History

Received : 2023-02-15

Accepted : 2023-05-12

Published : 2023-06-16

Kata Kunci:

Public Policy,
Management,
Traditional Market

Abstract: This study analyzes the effect of Regional Original Income (PAD) and Balancing Funds on the Human Development Index. The purpose of this study was to determine the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on the Human Development Index (IPM). The samples used in this study were 19 regencies/cities throughout West Sumatra Province from 2017 to 2022. The research method used was panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) and sensitivity testing using a one-year lag model. The results obtained show that the Special Allocation Fund and Regional Original Income (PAD) have a positive and significant effect on the Human Development Index (IPM). However, the use of sensitivity tests makes Local Own Revenue (PAD) not have a significant effect on the Human Development Index (IPM).

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 19 kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat dalam selang waktu 2017 sampai dengan 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dan uji sensitivitas dengan menggunakan model lag satu tahun. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Akan tetapi, penggunaan uji sensitivitas membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

IPM atau HDI adalah indeks yang menggambarkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam memperoleh hasil pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indikator-indikator ini penting dalam memvisualisasikan kualitas hidup penduduk di suatu daerah. Capaian

IPM berhubungan dengan kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah tersebut, di mana semakin tinggi IPM, semakin berkualitas pula SDM-nya. Sebaliknya, jika capaian IPM rendah, kualitas SDM di daerah tersebut juga rendah. Sayangnya, Indonesia masih menghadapi masalah ketimpa-

ngan dalam pembangunan manusia (Fauzia, 2019).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan komponen utama dalam upaya mencapai kemajuan suatu daerah atau negara melalui SDM yang berkualitas (Todaro, 2011). Capaian nilai IPM dipengaruhi oleh pembangunan yang dilakukan terhadap infrastruktur dan manusia. Pertumbuhan ekonomi juga terkait dengan pembangunan infrastruktur dan manusia yang berjalan lancar (Appiah et al., 2019). Pengalokasian pendapatan daerah dari sumber seperti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pusat daerah berkontribusi penting dalam meningkatkan nilai IPM. Pemerintah daerah dapat meningkatkan nilai IPM dengan mendistribusikan pendapatan dan belanja pada sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang merupakan faktor utama dalam mencapai nilai IPM yang tinggi (Wahyu & Dwirandra, 2015).

Indonesia menerapkan desentralisasi sebagai strategi untuk mencapai pemerataan pembangunan di setiap daerah. Desentralisasi memberikan hak otonomi kepada daerah dalam mengurus urusan mereka sendiri (Maria et al., 2019). Pada konteks ini, pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah perlu didukung dengan pendanaan yang disebut sebagai desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah kebebasan dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan mereka sendiri. Namun, terdapat kesenjangan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah-daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU digunakan terutama untuk pembiayaan yang menguntungkan masyarakat, DAK digunakan untuk program atau kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional, dan DBH digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah (Williantara & Budiasih, 2016).

Dana perimbangan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara daerah-daerah dan

mendorong pemerataan pembangunan. Namun, temuan menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal hanya memiliki pengaruh yang terbatas dalam mengurangi ketimpangan wilayah di Indonesia (Juanda et al., 2017). Penerimaan yang memadai dan seimbang oleh daerah seharusnya berkontribusi pada peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk yang dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penerimaan yang lebih besar seharusnya sejalan dengan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Otonomi Khusus. Penelitian Kamarni et al. (2022) menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus, DBH, DAK, DAU, dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap IPM. Penelitian Nashshar & Mulyana (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara DAK dan IPM. Penelitian Sembiring (2020) menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia, sementara DAU dan DAK Fisik tidak memiliki pengaruh signifikan. Riviando et al. (2019) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap IPM. Suhyanto et al. (2020) menemukan bahwa IPM dipengaruhi secara positif oleh DAU, PAD, dan DAK.

Menurut publikasi BPS tahun 2022, tiga provinsi di Pulau Sumatera berhasil masuk dalam peringkat 10 terbaik secara nasional dalam hal capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat ke-4 dengan nilai IPM 76,46, Provinsi Riau berada pada peringkat ke-7 dengan nilai IPM 73,52, dan Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke-9 dengan nilai IPM 73,26. Rata-rata capaian IPM nasional adalah 72,91. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki capaian IPM yang melebihi rata-rata nasional.

Pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat mencapai 5.116,71 M. Meskipun Provinsi Sumatera Utara memiliki PAD lebih tinggi,

yaitu sebesar 13.017,54 M, Provinsi Sumatera Barat memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi. Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai IPM sebesar 72,71. Begitu pula dengan Provinsi Sumatera Selatan dengan PAD 7.967,65 M dan IPM 70,90, serta Provinsi Lampung dengan PAD 6.157,65 M dan IPM 70,45. Meskipun pendapatan daerah provinsi-provinsi tersebut lebih tinggi daripada Provinsi Sumatera Barat, capaian IPM mereka lebih rendah dari IPM Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 73,26, bahkan di bawah rata-rata nasional IPM yang mencapai 72,91.

Hal ini menarik, karena Provinsi Sumatera Barat mampu mencapai nilai capaian IPM yang lebih tinggi meskipun memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif lebih kecil daripada provinsi lain. Diperkirakan bahwa faktor pendanaan selain PAD juga memiliki pengaruh signifikan dalam hal ini. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan (DAK, DAU, DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat menjadi menarik untuk dilakukan. Hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat
- H2 : Diduga variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat
- H3 : Diduga variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat
- H4 : Diduga variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat

LITERATUR REVIEW

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting dalam keberhasilan kesejahteraan masyarakat. IPM yang tinggi menandakan bahwa kualitas sumber daya

manusia daerah tersebut semakin baik. IPM ini dipengaruhi oleh keuangan daerah dan non keuangan daerah (Oktarini Khamilah Siregar, 2022).

Indeks pembangunan manusia mengukur capaian kesejahteraan manusia. Pada konsep ini penduduk di posisikan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi (UNDP, 1995). IPM dapat diartikan juga sebagai alat untuk mengukur kualitas masyarakat suatu negara yang dapat mencerminkan keadaan negara maju atau berkembang.

Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan dengan tiga indikator utama: harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Anggun Claudia Melgiana dan I Wayan Rupa dan Ni Putu Riasning, 2020). Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. IPM dapat dikategorikan menjadi 4 sebagai berikut (BPS, 2015) yaitu Rendah ($IPM < 60$), Sedang ($60 \leq IPM < 70$), Tinggi ($70 \leq IPM < 80$), Sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

DAK (Dana Alokasi Khusus)

Dana Alokasi Khusus adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004). DAK adalah hibah khusus dan dana ini diberikan kepada daerah yang penggunaannya berlaku persyaratan khusus. Dalam pengalokasian DAK ke daerah, perlu diperhatikan kecukupan pendanaan APBN sesuai UU No 23 Tahun 2014. Selain itu, DAK disebut juga dana infrastruktur karena merupakan modal yang digunakan untuk pembiayaan investasi pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana publik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Hastu Sarkoro dan Zulfikar, 2019).

DAK dibedakan menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non fisik. DAK Fisik digunakan untuk membiayai kegiatan fisik untuk mempercepat pembangunan daerah seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman serta sentra industri kecil

menengah. DAK Non fisik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam memperoleh pelayanan publik yang terjangkau dan berkualitas (PerPres Nomor 123 Tahun 2016). Dengan adanya DAK yang diberikan kepada daerah akan meningkatkan kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan pembangunan layanan publik.

DAU (Dana Alokasi Umum)

Dana Alokasi Umum dibiayai melalui APBN dan di alokasikan ke daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan dalam pembiayaan keuangan antar daerah (Erika Apulina Sembiring, 2019). DAU merupakan sumber dana yang bersifat "*Block Grant*" yang memungkinkan daerah untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah (Zul Fhadly, 2018). Dana Alokasi Umum dapat digunakan oleh daerah untuk membiayai belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di daerah tersebut, seperti yang dijelaskan Adel Rivianto, dkk (2019) besar kecilnya DAU yang diterima oleh suatu daerah akan berpengaruh terhadap IPM di daerah tersebut. DAU juga berperan dalam pemerataan ekonomi horizontal dengan mengurangi kesenjangan fiskal antara potensi ekonomi dan kebutuhan fiskal daerah. Selain itu, DAU disebut sebagai bantuan tak bersyarat karena tidak terikat pada program pengeluaran tertentu dalam transfer antar tingkat pemerintah.

DBH (Dana Bagi Hasil)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk pemerintah daerah yang dibiayai melalui APBN. DBH dialokasikan berdasarkan potensi masing-masing daerah, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan mendorong belanja daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan nasional, infrastruktur publik, dan meningkatkan pendapatan daerah, sebagaimana yang dijeaskan oleh Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016). DBH terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dan merupakan sumber dana dari APBN untuk pemerataan antar daerah

dan membiayai kebutuhan pembangunan daerah (Verra Rosyalia Widia Sofyan, 2023).

PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pendapatan daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Zulfatun Nisa dan Fitri Bahari, 2022). Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No 33 Tahun 2004).

Abdul Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk pembiayaan daerah dan kemampuan ekonomi dapat diukur berdasarkan besarnya kontribusi PAD terhadap APBD. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD yang tersedia agar dapat meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan IPM. Dalam pengalokasian PAD, Pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan (Wijaya, 2007).

METODE

Penelitian ini melibatkan seluruh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota. Untuk memilih sampel penelitian, metode *purposive sampling* digunakan dengan kriteria yang memperhatikan daerah kabupaten/kota yang memiliki data lengkap dan konsisten mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dana perimbangan seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), serta data pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun anggaran 2017 hingga 2022. Data IPM diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sementara data DAU, DAK, DBH, dan PAD diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang tersedia secara *online* melalui portal Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, variabel independen yang digunakan dalam penelitian meliputi realisasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil

(DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tabel 1 menyajikan ringkasan definisi operasional dan metode pengukuran variabel penelitian.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Operasional

Variabel	Kode	Pengukuran	Referensi
Indeks Pembangunan Manusia	IPM	Indeks komposit gabungan dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita.	BPS 2017-2022
Dana Alokasi Umum	DAU	Realisasi DAU per Kab/Kota	SIKD Direktorat Jenderal
Dana Alokasi Khusus	DAK	Realisasi DAK per Kab/Kota	Perimbangan keuangan,
Dana Bagi Hasil	DBH	Realisasi DBH per Kab/Kota	Kementerian Keuangan
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Realisasi PAD per Kab/Kota	

Sumber: data diolah

Pembangunan Manusia

Penelitian ini mengadopsi pendekatan pembangunan manusia yang dikemukakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indeks komposit yang menggambarkan kemampuan dasar manusia. IPM dihitung dengan menggabungkan tiga indeks yang mencerminkan aspek-aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Indeks kesehatan tercermin dalam angka harapan hidup, indeks pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah, sedangkan indeks standar hidup dapat dijelaskan dengan pengeluaran per kapita. IPM memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data IPM dari 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2022.

Dana Alokasi Umum

Dalam Undang-Undang No. 23/2014, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diakui sebagai pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). DAU digunakan untuk membiayai belanja daerah guna menerapkan desentralisasi dan mencapai pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. Dalam penelitian ini, variabel DAU diperoleh dari realisasi belanja pemerintah daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum dari tahun anggaran 2017 hingga 2022 di 19 Kabupaten dan Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat.

Dana Alokasi Khusus

Dalam UU No. 23/2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Tujuan dari DAK adalah untuk membantu pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Alokasi belanja DAK ditujukan untuk penyediaan dan perbaikan infrastruktur serta sarana dan prasarana di daerah. Dalam penelitian ini, variabel DAK diolah menggunakan data realisasi belanja yang berasal dari DAK dari tahun anggaran 2017 hingga 2022 di 19 Kabupaten dan Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat.

Dana Bagi Hasil

Dalam penelitian ini, definisi Dana

Bagi Hasil (DBH) mengacu pada UU No. 23/2014, yang menjelaskan DBH sebagai dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan persentase tertentu. Tujuan dari DBH adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. DBH merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Variabel DBH dalam penelitian ini diperoleh dari data realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2022, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sesuai dengan UU No. 33/2004. PAD merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ada di daerah tersebut, dan dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini, variabel PAD dihitung berdasarkan realisasi belanja yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dalam rentang waktu tahun anggaran 2017-2022 di 19 Kabupaten dan Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat.

Metode Analisis

Analisis riset ini melibatkan tiga pengujian untuk memilih model analisis data panel terbaik (Gujarati, 2012) yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* dan *common effect* dengan membandingkan nilai F statistik dan F tabel. Jika F statistik > F tabel atau $\alpha < 5\%$, maka model terpilih adalah model *fixed effect*. Jika model *common effect* dipilih, maka uji *Hausman* tidak diperlukan. Uji *Hausman* digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau *random effect* dengan menggunakan nilai *Chi-Square* dengan asumsi error

individual tidak saling berkorelasi begitu juga error kombinasinya. Jika $\alpha < 5\%$, maka model terpilih adalah model *fixed effect*. Jika model *fixed effect* dipilih, maka uji *Lagrange Multiplier* tidak diperlukan. Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk memilih antara model *common effect* atau *random effect* dengan membandingkan nilai *Chi-Square* statistik dengan *Chi-Square* tabel. Jika *Chi-Square* statistik > *Chi-Square* tabel, maka model terpilih adalah model *random effect*.

Pada pengujian hasil regresi, terdapat tiga uji untuk memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Uji pertama adalah uji multikolinearitas, yang dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Jika nilai korelasi koefisien melebihi 0,8, maka multikolinearitas menjadi masalah serius dalam model. Uji kedua adalah uji heteroskedastisitas, yang dilakukan dengan uji *Glejser* pada nilai residual, yaitu faktor yang terlibat tetapi tidak dimasukkan dalam model. Jika $p\text{-value} > \alpha = 5\%$, maka model terbebas dari heteroskedastisitas. Uji ketiga adalah uji autokorelasi, yang dilakukan dengan uji *Durbin-Watson*. Autokorelasi adalah korelasi kelambanan suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri yang tertinggal oleh sejumlah unit waktu, sementara serial korelasi adalah korelasi kelambanan antara dua seri atau rangkaian yang berbeda (Gujarati, 2012).

Analisis hipotesis dilakukan melalui regresi data panel dengan tujuan menguji pengaruh variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia. Pengujian regresi dilakukan secara parsial menggunakan uji t untuk mengevaluasi signifikansi koefisien regresi. Jika nilai signifikansi α kurang dari 5%, maka koefisien regresi dianggap signifikan dan hipotesis penelitian didukung, sebaliknya jika α lebih besar dari 5%. Selanjutnya, pengujian koefisien regresi secara simultan dilakukan melalui uji F . Jika nilai signifikansi α kurang dari 5%, maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya jika α lebih besar dari 5%. Data DAU, DAK, dan DBH tahun 2018 akan digunakan untuk menilai pengaruhnya terhadap IPM tahun 2018, dan seterusnya. Model regresi data panel yang digunakan dijelaskan dalam persamaan (1).

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it-1} + \beta_2 DAK_{it-1} + \beta_3 DBH_{it-1} + \beta_3 PAD_{it-1} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

IPM adalah indeks pembangunan manusia, *t* adalah time series tahun amatan, yaitu tahun 2018-2022, *i* adalah data *cross section* pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, β_0 adalah konstanta, β_{1-4} adalah koefisien variabel independen, yaitu DAU adalah Dana Alokasi Umum, DAK adalah Dana Alokasi Khusus, DBH adalah Dana Bagi Hasil, PAD adalah Pendapatan Asli Daerah dan ε adalah residual.

Selanjutnya, dilakukan pengujian sensitivitas untuk mengevaluasi keandalan hasil pengujian sebelumnya dengan menggunakan regresi data panel yang mengadopsi model distribusi kelambanan (*lag*). Alasan pemilihan model ini adalah karena menurut Gujarati (2012) dan Widarjono (2018), dampak dari penerapan kebijakan fiskal dan moneter biasanya tidak terjadi secara langsung tetapi memerlukan waktu atau mengalami kelambanan (*lag*). Dalam pengujian ini, koefisien regresi parsial diuji menggunakan uji t, dengan tingkat signifikansi (α) kurang dari 5%. Jika koefisien regresi signifikan, maka hipotesis penelitian ini didukung, dan sebaliknya (Gujarati, 2012).

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Model data panel yang mengadopsi model *lag* satu tahun akan digunakan untuk menilai pengaruh DAU, DAK, DBH, dan PAD tahun 2017 pada IPM tahun 2018, dan seterusnya. Model regresi data panel yang mengadopsi model *lag* satu tahun dinyatakan dalam persamaan (2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Alokasi dana perimbangan mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan baik dalam alokasi dana perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Situasi pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi dana perimbangan. Alokasi dana perimbangan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat juga mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2020, termasuk PAD-nya. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam capaian PAD. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rata-rata juga mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 hingga 2022.

Variabel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DAU (Miliar Rp)						
Mean	580.7505	585.4637	628.5258	567.4174	559.8132	559.9463
Minimum	375.13	11.4	390.09	347.5	341.39	341.39
Maximum	838.1	1100.37	1176.32	1061.39	1044.87	1044.87
StDev	153.1574	233.2468	204.6862	184.4352	182.3415	182.3526
DAK (Miliar Rp)						
Mean	153.4242	188.0005	193.1442	170.7789	179.2195	205.7458
Minimum	49.81	57.42	54.86	51.34	54.84	52.36
Maximum	277.24	442	339.31	310.42	315.55	388.15
StDev	70.40304	99.29383	89.89513	86.15868	90.81424	102.5635
DBH (Miliar Rp)						
Mean	19.48158	17.78842	16.00158	17.04632	28.26947	30.53316
Minimum	12.45	9.25	8.36	8.88	15.35	16.04
Maximum	26.2	64.53	48.51	73.75	91.73	102.52
StDev	4.454683	12.25513	9.608407	14.11447	18.33626	22.28804
PAD (Miliar Rp)						

Mean	112.6016	104.9174	110.4221	106.1621	111.9611	119.1242
Minimum	30.88	32.21	36.67	32.96	31.64	36.04
Maximum	176.9	487.94	546.11	499.9	538.93	555.74
StDev	43.90624	97.92229	109.4766	99.46555	108.3126	111.681
IPM (Miliar Rp)						
Mean	71.16158	71.74632	72.41	72.44316	72.60421	73.30789
Minimum	59.25	60.28	61.26	61.09	61.35	62.19
Maximum	81.58	82.25	82.68	82.82	82.9	83.29
StDev	5.694122	5.578055	5.4904	5.490057	5.456884	5.399309

Sumber: Data BPS dan Kemenkeu RI, diolah

Hasil Pengujian Model Analisis Data Panel

Hasil dari pengujian model analisis data panel dapat ditemukan dalam Tabel 3 dan Tabel 4. Berdasarkan hasil uji *Chow*, diperoleh *p-value* sebesar 0,0000, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa model *fixed effect* memberikan performa yang lebih baik daripada model *common effect*. Selanjutnya, uji *Hausman* juga menghasilkan *p-value* sebesar 0,0000, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi $\alpha=5\%$.

Temuan ini mengindikasikan bahwa model *fixed effect* memiliki kinerja yang lebih baik daripada model *random effect*. Dalam konteks penelitian ini, uji *Lagrange Multiplier* tidak dilakukan karena hasil dari uji *Chow* dan uji *Hausman* sudah menunjukkan bahwa model *fixed effect* merupakan model terbaik yang digunakan untuk analisis data panel.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>df.</i>	<i>Prob.</i>
Cross-section F	20.819008	(18,72)	0.0000
Cross-section Chi-square	173.404967	18	0.0000

Keterangan: signifikan pada $\alpha=5\%$

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.423538	4	0.0000

Keterangan: signifikan pada $\alpha=5\%$

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas dapat ditemukan dalam Tabel 5. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD lebih besar dari 0,8. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi adanya multikolinearitas antara variabel independen

dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai *p-value* lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD tidak terdampak oleh heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil Pengujian Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas

Uji Multikolinearitas					Uji Heteroskedastisitas	
Variabel	DAU	DAK	DBH	PAD	Prob	Sig
DAU	1	0,7067	0,3953	0,7054	0,3165	Tidak Signifikan
DAK	0,7067	1	0,3309	0,4266	0,7911	Tidak Signifikan
DBH	0,3953	0,3309	1	0,7438	0,9114	Tidak Signifikan
PAD	0,7054	0,4266	0,7438	1	0,9654	Tidak Signifikan

Setelah menerapkan model *fixed effect*, sebelumnya dilakukan pengujian autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson (D-W). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai statistik D-W adalah 1,4223, sementara nilai kritis D-W pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$ adalah $dL=1,557$ dan $dU=1,778$. Dalam konteks ini, nilai statistik D-W berada di antara 0 dan dL , mengindikasikan adanya autokorelasi positif dalam model penelitian. Namun, penting untuk diketahui bahwa dalam penelitian dengan data panel, masalah autokorelasi tidak perlu menjadi perhatian utama. Penggunaan data panel sendiri merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah autokorelasi (Gujarati, 2012). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, estimasi *Generalized Least Square* (GLS) digunakan untuk menangani autokorelasi temporal dan korelasi antar observasi lintas sektoral (Insukindro, 2001)

Hasil Pengujian Hipotesis

Dari Tabel 6, kita dapat melihat hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan model *fixed effect* dan metode GLS. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel DAU tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat karena nilai $t_{\text{statistik}}=1,97$ dan nilai signifikansi $0,0520 > 0,05$. Oleh karena itu, H1 ditolak. Variabel DAK signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat karena nilai $t_{\text{statistik}}=4,44$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, H2 diterima. Variabel DBH tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat karena nilai $t_{\text{statistik}}=-1,635$ dan nilai signifikansi $0,1063 > 0,05$. Oleh karena itu, H3 ditolak. Variabel PAD signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di

Provinsi Sumatera Barat karena nilai $t_{\text{statistik}}=2,773$ dan nilai signifikansi $0,0071 < 0,05$. Oleh karena itu, H4 diterima.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Menggunakan *Fixed Effect Model*

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 PAD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variabel	B	t-statistik	Prob
Konstanta	71,22342	63,39669	0,0000
DAU	-	-	0,0520
	0,004763	1,975622	
DAK	0,015473	4,449417	0,0000
DBH	-	-	0,1063
	0,033574	1,635592	
PAD	0,017005	2,773007	0,0071
R ²	0,930558		
Prob. F	0,000000		

Dari uji F secara simultan, kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, koefisien determinasi (*R-Square*) 0,9305 menunjukkan bahwa DAU, DAK, DBH, dan PAD dapat menjelaskan sekitar 93,05% variasi pada indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat, sementara 6,95% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Sensitivitas

Untuk menguji kestabilan hasil pengujian sebelumnya, dilakukan pengujian sensitivitas dengan menggunakan model regresi data panel dengan lag satu tahun. Ini karena dampak kebijakan moneter dan fiskal terhadap aktivitas ekonomi tidak langsung terlihat pada tahun yang sama, tetapi membutuhkan waktu atau *lag*. Dalam model regresi dengan lag satu tahun, data DAU,

DAK, DBH, dan PAD tahun 2017 akan dilihat pengaruhnya terhadap IPM tahun 2018, dan seterusnya. Data yang digunakan dalam model ini adalah realisasi DAU, DAK, DBH, dan PAD dari tahun 2017 sampai 2021, sedangkan data IPM yang digunakan adalah dari tahun 2018 sampai 2022.

Sebelum melakukan regresi pada model data panel dengan lag satu tahun, dilakukan pengujian model analisis data panel dan uji asumsi klasik. Hasil pengujian secara konsisten menunjukkan bahwa model *fixed effect* adalah model yang paling sesuai untuk data panel yang digunakan. Kemudian, pada pengujian asumsi klasik, ditemukan bahwa model memenuhi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, tetapi tidak memenuhi uji autokorelasi. Oleh karena itu, estimasi tetap menggunakan variasi GLS, sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Sukindro (2001) untuk mengatasi masalah autokorelasi. Tabel yang ditampilkan (Tabel 7) menunjukkan hasil dari pengujian sensitivitas menggunakan model *fixed effect* dengan metode GLS dan model lag satu tahun.

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *Lag*

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it-1} + \beta_2 DAK_{it-1} + \beta_3 DBH_{it-1} + \beta_4 PAD_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

Variabel	B	t-statistik	Prob
Konstanta	72,18301	71,04144	0,0000
LAGDAU	-	-	0,1665
LAGDAK	0,003380	1,397842	
LAGDBH	0,008408	2,122551	0,0372
LAGPAD	0,020985	0,693135	0,4905
	0,003599	0,554589	0,5809
R ²	0,888861		
Prob. F	0,000000		

Ada sedikit perbedaan dengan pengujian sebelumnya, pada pengujian dengan menggunakan metode lag hanya satu variabel yang signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia. Dari hasil uji statistik, variabel LAGDAU memiliki $t_{\text{statistik}} - 1,397$ dan nilai signifikansi $0,1665 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa DAU tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Vari-

abel LAGDAK memiliki $t_{\text{statistik}} 2,122$ dan nilai signifikansi $0,0372 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa DAK signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Variabel LAGDBH memiliki $t_{\text{statistik}} 0,693$ dan nilai signifikansi $0,4905 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa DBH tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Variabel LAGPAD memiliki $t_{\text{statistik}} 0,5545$ dan signifikansi $0,5809 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa PAD tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Hasil uji F secara simultan menemukan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini berarti bahwa variabel DAU, DAK, DBH dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis 1 tidak didukung oleh bukti empiris, DAU tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Sembiring (2020) dan Mutiha (2018). Faktor utama yang menyebabkan DAU tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia adalah penggunaan dan pengelolaan DAU yang tidak tepat sasaran. Pengalokasian DAU dari pemerintah pusat bersifat *block grant* sehingga pemerintah daerah bebas menggunakan DAU sesuai kepentingannya. Sebagian besar pemerintah daerah mengaokasikan DAU untuk pos belanja rutin seperti belanja operasional, belanja gaji pegawai dan urusan pemerintah lainnya. Padahal untuk mendukung pembangunan manusia dibutuhkan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur serta belanja barang yang digunakan untuk pemberian bantuan, subsidi dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis 2 didukung oleh data empiris. DAK signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Artinya, semakin besar DAK, maka pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian

Riviando et al (2019), Maria et al., (2021), Nashshar (2022) dan Kamarni (2022) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap peningkatan IPM. DAK bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan belanja yang bersumber dari DAK untuk membangun infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan pelayanan umum. Dengan demikian diharapkan dengan penggunaan DAK sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 dapat membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur publik dengan umur ekonomis yang lama.

Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis 3 tidak sesuai dengan bukti empiris, yaitu DBH tidak signifikan memengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Mutiha (2018) Maria et al., (2021) dan Kamarni et al., (2022). Komponen DBH pada Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh DBH atas Pajak Penghasilan dan DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu DBH yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak bumi, mineral, batubara dan kehutanan nilainya relatif kecil. Fluktuasi variabel DBH terlihat dari penurunan realisasi dari tahun 2017 sampai 2019 yang mengalami penurunan dan meningkat pada tahun 2020 sampai 2022.

Penelitian ini menemukan bahwa hipotesis 4 sesuai dengan bukti empiris. PAD signifikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya Mutiha (2018), Riviando et al., dan Sembiring (2020). PAD pada setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Namun demikian alokasi belanja yang bersumber dari PAD dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan ekonomi seperti penyediaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum.

Pengujian sensitivitas dengan menggunakan model lag, menemukan hasil yang sedikit berbeda dimana hanya variabel DAK yang signifikan memengaruhi indeks

pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Variabel PAD yang pada pengujian regresi *fixed effect* metode GLS tanpa lag signifikan berpengaruh positif, mengalami perubahan nilai signifikansi pada uji sensitivitas sehingga menjadi tidak signifikan. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan melihat rata-rata PAD di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami lonjakan pada tahun 2022. Sebelumnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata PAD di Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi naik dan turun.

Alokasi belanja yang bersumber dari DAK sebagian besar digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk membangun infrastruktur fasilitas publik seperti sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan dan juga belanja bantuan berupa subsidi. Dengan adanya fasilitas publik dan belanja subsidi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pencapaian standar hidup layak. Sebagai contoh program digitalisasi pada sekolah, umkm dan masyarakat desa. Dalam program tersebut, pemerintah akan menyediakan peralatan Teknologi dan Informasi (TIK). Pada akhirnya kualitas sumber daya manusia akan meningkat seiring dengan mudahnya akses terhadap sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan dan teknologi informasi.

KESIMPULAN

Riset ini memberikan bukti empiris bahwa realisasi dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Artinya semakin besar DAK, maka pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat juga semakin tinggi, demikian juga sebaliknya. Selanjutnya dana perimbangan yang lain berupa DAU dan DBH ditemukan tidak memiliki pengaruh pada indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan DAU yang bersifat *block grants* dan digunakan untuk pembiayaan belanja rutin seperti belanja gaji pegawai dan belanja operasional sehingga tidak berdampak langsung pada indeks pembangunan manusia. Selanjutnya fluktuasi data DBH pada tahun 2017 sampai

dengan 2019 serta masih minimnya realisasi DBH yang bersumber dari sumber daya alam seperti mineral, minyak bumi dan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat berimplikasi pada tidak signifikannya hubungan antara DBH dan IPM. Variabel PAD pada penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda pada uji regresi pertama dan uji sensitivitas. Pada pengujian *fixed effect* tanpa lag ditemukan bahwa PAD memiliki hubungan positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selanjutnya pada uji sensitivitas ditemukan bahwa PAD tidak memiliki hubungan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Secara simultan, dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH serta PAD memiliki pengaruh signifikan pada indeks pembangunan manusia. Penelitian ini membuktikan bahwa baik dana perimbangan maupun pendapatan asli daerah secara bersama-sama mempunyai kontribusi terhadap pembangunan kualitas manusia di Provinsi Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Appiah, M., Amoasi, R., & Frowne, D. I. (2019). Human Development and Its Effects on Economic Growth and Development. *International Research Journal of Business Studies*, 12(2), 101-109.
- Maria, E., Halim, M., Luthfan. (2021). Dana Perimbangan Dan Pembangunan Manusia: Sebuah Bukti Pengujian Dari Pulau Kalimantan. *Journal of Applied Business and Economics (JABE) Vol. 7 No. 3 (Maret 2021) 306-324*
- Fauzia, M. (2019, April 15). Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Antar Daerah Tinggi. <https://money.kompas.com/read/2019/04/15/183100126/kesenjanganindeks-pembangunan-manusia-antar-daerah-tinggi>.
- Gujarati, D. (2012). *Basic Econometrics* (5th ed.). Mc Graw Hill.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Insukindro.2001. *Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar*. Yogyakarta: PAU UGM.
- Juanda, B., E. Suratman, dan H. Handra. (2017). The Fiscal Transfer Effect on Regional Inequality. The 6th Indonesian Regional Science Association (IRSA) International Institute, Manado, 17-18 Juli 2017.
- Kamarni, Neng., Ginting, C. Y., Septya, Maulani. (2022). Dampak Dana Otonomi Khusus Dan Dan Perimbangan Terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol 13, No 2.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1-22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>.
- Melgiana, Anggun Claudia dan I Wayan Rupa dan Ni Putu Riasning. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 1 (1) 2020; 45-49
- Mutiha, A., H., Mutiha. (2018). The Effect of Regional Own-Source Revenue, Tax Revenue-Sharing Fund, General Allocation Fund and Special Allocation Fund to The Human Development Index (Based on The Study of Provincial Government in Indonesia). *The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICHVE) 2017 "The Importance on Advancing Vocational Education to Meet Contemporary Labor Demands"*. KnE

- Social Sciences pages 609-624. DOI 10.18502/kss.v3i11.2792.
- Nashshar, M., I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 255-270.
- Nisa, Zulfatun dan Fitri Bahari. (2022). *Effect of Regional Tax, Population, and GRDP on Original Local Government Revenue (PAD) in the Regency/City of Central Java Province*. jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Volume 13, Nomor 1, Januari 2022
- Otong S., Juanda, B., Fauzi. A., dan Rustiadi, E. (2020). Pengaruh Dana Transfer Dana Desa Dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 4(3), 285-305.
- Patadang, Tirza Meireny, Tri Oldy Rotinsulu, dan Ita Pingkan Fasnier Rorong. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Minda-hasa Tenggara Dengan Pengeluaran Di Bidang Kesehatan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.22 No.2 (2021)
- PERPRES No 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- Riviando, Adel, Agustin, Henri, Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017. *Jurnal*
- Eksplorasi Akuntansi, 1(1) Seri A, 1-17.
- Sarkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintahan Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 2016
- Saswatata, Satmaka Srasa dan Parju. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* ISSN: 2302-2752, E-ISSN: 2722-0494 Vol.11 No.1, 2022 April
- Sembiring, Tri Asmeli. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77-92. Vol.5, No.1, (2020), Hal.77-91
- Siregar, Oktarini Khamilah. 2022. Regional Original Revenue, Regional Expenditure, Economic Growth and Human Development Index (City/Regency Government in North Sumatra Province). *Economics, Business and Management Science Journal*, 2 (2) 2022: 65-72
- Sofyan, Verra Rosyalia Widia. (2023). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* Volume 9 No 1 Januari 2023
- Sulaeman, Agus Sunarya dan Novi Andriyanto. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Mendorong Pertumbuhan Pembangunan Daerah Di Indonesia. *JAA* Vol 5 No 2 April 2021

Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

[ndex.php/akt/article/viewFile/2978/2189](https://ejournal.unp.ac.id/index.php/akt/article/viewFile/2978/2189)

United Nations Development Program. (1995). Human Development Report 1995. New York: United Nations Development Program

UNDP. (1990). Human Development Report 1990. Oxford University Press.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah

Undang -Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N.. (2015). Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah untuk Menciptakan Quality Spending. *Simpodium Nasional Akuntansi 18*, 1-23.

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika* (Edisi 5). BPFE.

Williantara, Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.3. September (2016): 2044-2070 ISSN: 2302-8556*

Wijaya, Toni. (2007). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta". *Modus 19(2)*

Zul Fadhly. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sumatera Barat (Studi Eksperimentasi Semu Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Padang). <https://ejournal.unp.ac.id/students/i>